# RENCANA KERJA TAHUN 2024

## RENJA








**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Kabupaten Nunukan**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan secara terencana dan terpadu agar dapat diimplementasikan secara efektif,efisien dan tepat sasaran. Dan salah satu cara untuk mendukung pembangunan secara terencana adalah dengan menyusun rencana kerja (Renja) di tingkat SKPD, termasuk pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daearah dan rencana kerja pemerintah daerah, Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (Satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Renja DSP3A ) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada dasarnya memuat rencana kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renja 2024 melalui serangkaian langkah sebagai berikut:

1. Pengolahan Data dan Informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Perumusan Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telahaan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2018;
6. Perumusan Tujuan dan Sasaran;
7. Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musrembang tingkat kecamatan dan kabupaten, maupun masukan baik lisan maupun tertulis dari masyarakat;

8. Identifikasi kebijakan serta Program Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Perumusan program dan kegiatan prioritas;
10. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
11. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
12. Pembahasan forum SKPD; dan
13. Pembangunan dokumen racangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta kebijakan lainnya yang bersifat wajib dan atau urgen

- **Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan**

  Dokumen Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2024 adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, yang memuat rencana pembangunan yang terkait urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Rencana program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja DPK Tahun 2023 akan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

- **Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Strategis (Renstra) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026**

  Penyusunan Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Maka penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2023 mengacu pada Rancangan Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten.

- **Keterkaitan Renja DSP3A dengan Rancangan Strategis (Renstra) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026**

  Akumulasi dari pagu indikatif yang terdapat pada seluruh Renja SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 termasuk Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2024 akan menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Dokumen KUA-PPAS ini lah nantinya yang akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2024, dan yang teknis penyusunan menjadi tanggungjawab perangkat daerah masing-masing selaku perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962 ) ;

2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).

9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKP ) Daerah;

12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati nunukan nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, dan fungsi serta tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan;

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Kerja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur peniaian Kinerja DSP3A Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024

Sedangkan tujuan disusunnya rancangan Renja DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2024, Yaitu :

1. Merumuskan Program dan Kegiatan Pembangunan DSP3A Kabupaten Nunukan selama Tahun 2024;
2. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
3. Terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pelayanan publik;
4. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 di Lingkungan DSP3A Kabupaten Nunukan.
5. Sebagai bahan penyusuan Kinerja Laporan (LKJIP) DSP3A Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2024 terdiri dari 5 (Lima) Bab, dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD (Tabel TC.29)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ( T-C.30 )
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review Rancangan Awal RKPD ( T-C.31 )
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ( T-C.32 )

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD**

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

**BAB V PENUTUP**

# BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Agar mudah mengidentifikasikan tahun mana yang dimaksud dengan tahun lalu, tahun berjalan, atau tiga tahun sebelum rencana, berikut ini diuraikan ilustrasi menggunakan angka tahun.

Misalnya untuk Penyusunan Renja DSP3A Tahun 2024, maka :
Tahun n = Tahun yang direncanakan,yaitu tahun 2024
Tahun n-1 = Tahun berjalan, yaitu tahun 2023
Tahun n-2 = Tahun lalu,yaitu tahun 2022

Dari ilustrasi di atas maka review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang dimaksud adalah review terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada renja Tahun Anggaran 2022 (n-2), sedangkan perkiraan capaian tahun berjalan adalah perkiraan capaian kinerja pada tahun 2023 (n-1)

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang akan direview terhadap Renja Tahun 2024 antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut akan disajikan **tabel T-C. 27** Trencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DSP3A Kab. Nunukan dan Pencapaian Renstra DSP3A mulai dari tahun 2022 :

# Tabel T-C.27

**Tabel T-C.27**
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal | Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Internal Penanggung | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | **8.103.157.424,00** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **8.103.157.424,70** | | | | | | | | | | |
| **BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | | | **8.014.225.239** | | **8.103.157.425** | | **8.104.810.044** | | **8.406.550.350** | | **8.731.883.194** | | **41.360.626.252** | | |
| | **Meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah** | **Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP** | | | Nilai Sakip | B | B | **5.899.454.719** | **B** | **6.048.124.064** | **BB** | **6.127.434.144** | **BB** | **6.281.724.254** | **A** | **6.445.404.101** | **A** | **30.802.141.282** | | |
| | | | | | | | | 5.899.454.719 | 100 Perse | 6.048.124.064 | 100 Perse | 6.127.434.144 | 100 Perse n | 6.281.724.254 | 100 Perse | 6.445.404.101 | | | | |
| | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas** | **Persen** | **85** | **85** | **5.899.454.719** | **85** | **6.048.124.064** | **90** | **6.127.434.144** | **90** | **6.281.724.254** | **90** | **6.445.404.101** | **90** | **30.802.141.282** | | |
| | | | Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun | dokumen | 6 | 6 | 32.500.000 | 6 | 35.750.000 | 6 | 39.325.000 | 6 | 43.257.500 | 6 | 47.583.250 | 6 | 198.415.750 | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5 | 23.000.000 | 5 | 25.300.000 | 5 | 27.830.000 | 5 | 30.613.000 | 5 | 33.674.300 | 25 | 140.417.300 | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 2 | 9.500.000 | 2 | 10.450.000 | 2 | 11.495.000 | 2 | 12.644.500 | 2 | 13.908.950 | 10 | 57.998.450 | | |
| | | | Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah | Jumlah Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 12 | 12 | 5.188.118.009 | 12 | 5.265.653.683 | 12 | 5.266.716.725 | 12 | 5.334.935.093 | 12 | 5.403.936.024 | 12 | 26.459.359.534 | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 32 | 32 | 5.188.118.009 | 32 | 5.265.653.683 | 32 | 5.266.716.725 | 32 | 5.334.935.093 | 32 | 5.403.936.024 | 32 | 26.459.359.534 | | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | Unit | 6 | 6 | 175.626.673 | 6 | 193.189.340 | 6 | 212.508.274 | 6 | 233.759.102 | 6 | 257.135.012 | 6 | 1.072.218.401 | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 7 | 7 | 23.627.006 | 8 | 25.989.707 | 9 | 28.588.677 | 10 | 31.447.545 | 11 | 34.592.299 | 45 | 144.245.234 | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 14.300.000 | 4 | 15.730.000 | 4 | 17.303.000 | 4 | 19.033.300 | 4 | 20.936.630 | 20 | 87.302.930 | | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 5.699.667 | 2 | 6.269.634 | 2 | 6.896.597 | 2 | 7.586.257 | 2 | 8.344.882 | 13 | 34.797.037 | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | 132.000.000 | 1 | 145.200.000 | 1 | 159.720.000 | 1 | 175.692.000 | 1 | 193.261.200 | 5 | 805.873.200 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | Unit | 6 | 6 | 447.210.037 | 6 | 491.931.041 | 6 | 541.124.145 | 6 | 595.236.559 | 6 | 654.760.215 | 6 | 2.730.261.997 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 2.849.891 | 1 | 3.134.880 | 1 | 3.448.368 | 1 | 3.793.205 | 1 | 4.172.525,41 | 5 | 17.398.870 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 17.099.346 | 3 | 18.809.281 | 3 | 20.690.209 | 3 | 22.759.230 | 3 | 25.035.152 | 15 | 104.393.217 | | |
| | | | pengeyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 5 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.500.000 | 5 | 6.050.000 | 5 | 6.655.000 | 5 | 7.320.500 | 25 | 30.525.500 | | |
| | | | Penyediaan jasa Pelayananan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 422.260.800 | 1 | 464.486.880 | 1 | 510.935.568 | 1 | 562.029.125 | 1 | 618.232.037 | 1 | 2.577.944.410 | | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara | Unit | 11 | 11 | 56.000.000 | 11 | 61.600.000 | 12 | 67.760.000 | 12 | 74.536.000 | 12 | 81.989.600 | 58 | 341.885.600 | | |
| | | | penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan ,dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 10 | 47.000.000 | 10 | 51.700.000 | 10 | 56.870.000 | 10 | 62.557.000 | 10 | 68.812.700 | 50 | 286.939.700 | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.900.000 | 2 | 10.890.000 | 2 | 11.979.000 | 2 | 13.176.900 | 8 | 54.945.900 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya Kualitas Penanganan dan Pelayanan PPKS** | | **Persentase PPKS yang tertangani** | | | **Persen** | **NA** | **75,00** | **1.732.977.601,00** | **75,00** | **1.692.254.133,40** | **75,00** | **1.606.379.606,61** | **80** | **1.745.496.337,77** | **80** | **1.898.524.744,65** | **80** | **8.675.632.423,43** | | |
| | **Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS** | **Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial** | | | **Persen** | **NA** | **36** | **126.038.430,00** | **38** | **95.142.273,00** | **40** | **99.656.500,00** | **42** | **104.622.150,00** | **45** | **110.084.365,00** | **45** | **535.543.718,00** | | |
| | | | **Program Pemberdayaan Sosial** | **Persentase sumberdaya kesejahteraan yang diberdayakan** | **Persen** | **50** | **50** | **35.000.000,00** | **50** | **50.000.000,00** | **50** | **50.000.000,00** | **50** | **50.000.000,00** | **50** | **50.000.000,00** | **50** | **235.000.000,00** | | |
| | | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Jumlah KAT yang diberdayakan | KAT | 1 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 45.000.000,00 | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | 10 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | 10 | 10.000.000,00 | 10 | 45.000.000,00 | | |
| | | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan | Rekomendasi | NA | 3 | 5.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 5 | 10.000.000,00 | 23 | 45.000.000,00 | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Dokumen | NA | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 10.000.000,00 | 1 | 45.000.000 | | |
| | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS | Orang | 21 | 21 | 25.000.000,00 | 21 | 30.000.000,00 | 21 | 30.000.000,00 | 21 | 30.000.000,00 | 21 | 30.000.000,00 | 21 | 145.000.000,00 | | |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota | Orang | 11 | 11 | 10.000.000,00 | 11 | 15.000.000,00 | 11 | 15.000.000,00 | 11 | 15.000.000,00 | 12 | 15.000.000,00 | 56 | 70.000.000 | | |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 12 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 21 | 25.000.000 | | |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | 10 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 5.000.000,00 | 10 | 25.000.000 | | |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga | 5 | 5 | 5.000.000,00 | 5 | 5.000.000,00 | 5 | 5.000.000,00 | 6 | 5.000.000,00 | 6 | 5.000.000,00 | 6 | 25.000.000 | | |
| | | | | | | | | 91.038.430 | 67 % | 45.142.273 | 76 % | 49.656.500 | 83 % | 54.622.150 | 90 % | 60.084.365 | | | | |
| | | | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | **Presentase pengelolaan taman makam pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara** | **Persen** | **75** | **80** | **91.038.430** | **80** | **45.142.273** | **80** | **49.656.500** | **80** | **54.622.150** | **80** | **60.084.365** | **80** | **300.543.718** | | |
| | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | Kawasan | 1 | 1 | 91.038.430 | 67 % | 45.142.273 | 76 % | 49.656.500 | 83 % | 54.622.150 | 90 % | 60.084.365 | 1 | 300.543.718 | | |
| | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 51.038.430 | 1 | 25.142.273 | 1 | 24.656.500 | 1 | 34.622.150 | 1 | 30.084.365 | 1 | 165.543.718 | | |
| | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Makam | 1 | 1 | 40.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 135.000.000 | | |
| | **Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS** | **Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial** | | | **Persen** | **NA** | **80%** | **935.512.177** | **80%** | **858.542.167** | **85%** | **927.875.156** | **85%** | **1.004.141.443** | **90%** | **1.088.034.360** | **90%** | **4.814.105.303** | | |
| | | | | | | | | 90.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** | **Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani** | **Persen** | **100** | **100** | **90.000.000** | **100** | **50.000.000** | **100** | **50.000.000** | **100,00** | **50.000.000** | **100** | **50.000.000** | **100** | **290.000.000** | | |
| | | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Orang | 2 | 10 | 90.000.000 | 10 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 14 | 50.000.000 | 58 | 290.000.000 | | |
| | | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 2 | 10 | 90.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 14 | **290.000.000** | | |
| | | | | 0 | | | | 845.512.177 | | 808.542.167 | 72,12 Pers | 877.875.156 | 86,06 Persen | 954.141.443 | 100 Perse | 1.038.034.360 | | | | |
| | | | **Program Rehabilitasi Sosial** | **Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS** | **Persen** | **18,2** | **15,38** | **845.512.177** | **16,84** | **808.542.167** | **18,88** | **877.875.156** | **20,50** | **954.141.443** | **22,38** | **1.038.034.360** | **22,38** | **4.524.105.303** | | |
| | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Ter;antar, serta Gelandangan pengemis diluar panti | Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi | Orang | 172 | 190 | 570.512.177 | 207 | 584.362.167 | 232 | 627.875.156 | 252 | 654.141.443 | 275 | 688.034.360 | 1156 | 3.124.925.303 | | |
| | | 688.034.360 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Orang | 41 | 51 | 85.299.898 | 55 | 85.000.000 | 60 | 110.299.898 | 65 | 110.299.898 | 70 | 110.299.898 | 301 | 501.199.592 | | |
| | | - | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan | Orang | 15 | 5 | 75.000.000 | 17 | 65.300.398 | 19 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 30 | 100.000.000 | 96 | 440.300.398 | | |
| | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Orang | 8 | 2 | 96.000.000 | 3 | 119.849.490 | 4 | 103.362.979 | 5 | 129.629.266 | 7 | 163.522.183 | 21 | 612.363.918 | | |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 8 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 110 | 500.000.000 | | |
| | | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 10 | 10 | 64.000.000 | 10 | 64.000.000 | 12 | 64.000.000 | 14 | 64.000.000 | 15 | 64.000.000 | 61 | 320.000.000 | | |
| | | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 40 | 50 | 50.212.279 | 50 | 50.212.279 | 55 | 50.212.279 | 55 | 50.212.279 | 60 | 50.212.279 | 270 | 251.061.395 | | |
| | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 65 | 50.000.000 | 285 | 250.000.000 | | |
| | | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | N/A | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 12 | 250.000.000 | | |
| | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial | Orang | 6 | 9 | 275.000.000 | 11 | 224.180.000 | 13 | 250.000.000 | 16 | 300.000.000 | 18 | 350.000.000 | 100,00 | 1.399.180.000 | | |
| | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5 | 5 | 100.000.000 | 5 | 110.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 25 | 485.000.000 | | |
| | | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah anak terlantar ,lansia terlantar, penyandang disabilitas gelandangan dan penegemis yang memperoleh Layanan Rujukan | Orang | N/A | 2 | 175.000.000 | 2 | 114.180.000 | 3 | 175.000.000 | 3 | 200.000.000 | 4 | 250.000.000 | 14 | 914.180.000 | | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS** | **Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial** | **514790375,3** | | **Persen** | **NA** | **75** | **671.426.994** | **75** | **738.569.693** | **75** | **578.847.951** | **80** | **636.732.745** | **80** | **700.406.020** | **80** | **3.325.983.402** | | |
| | | | **467.991.250** | - | | | | 485.108.753 | 45 Persen | 533.619.628 | 50 Persen | 353.402.879 | 55 Persen | 388.743.166 | 60 Persen | 427.617.483 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial** | **Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani** | **Persen** | **NA** | **86** | **485.108.753** | **93** | **533.619.628** | **93** | **353.402.879** | **93** | **388.743.166** | **90** | **427.617.483** | **90** | **2.188.491.909** | | |
| | | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Jumlah anak terlantar yang ditangani | Orang | 145 | 20 | 133.500.000 | 30 | 146.850.000 | 30 | 161.535.000 | 30 | 101.156.000 | 25 | 111.271.600 | 135 | 654.312.600 | | |
| | | | Penjangkauan anak-anak terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 155 | 20 | 43.000.000 | 30 | 47.300.000 | 30 | 52.030.000 | 30 | 57.233.000 | 25 | 62.956.300 | 135 | 262.519.300 | | |
| | | | Rujukan anak-anak terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 10 | 10 | 90.500.000 | 5 | 99.550.000 | 5 | 109.505.000 | 5 | 43.923.000 | 5 | 48.315.300 | 30 | 391.793.300 | | |
| | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah data fakir miskin yang valid | Orang | NA | 20.000 | 351.608.753 | 20.000 | 386.769.628 | 20.000 | 191.867.879 | 20.000 | 287.587.166 | 20.000 | 316.345.883 | 20.000 | 1.534.179.309 | | |
| | | | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Orang | 27.626 | 27.626 | 152.213.812 | 27.626 | 167.435.193 | 27.626 | 75.000.000 | 27.626 | 150.000.000 | 27.626 | 90.750.000 | 27.626 | 635.399.005 | | |
| | 287.587.166,00 | | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Keluarga | NA | 5.714 | 99.394.941 | 5.714 | 109.334.435 | 5.714 | 75.000.000 | 5.714 | 95.719.287 | 5.714 | 96.124.556 | 5.714 | 475.573.219 | | |
| | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | NA | 6.091 | 50.000.000 | 6.091 | 55.000.000 | 6.091 | 16.867.879 | 6.091 | 16.867.879 | 6.091 | 78.811.193,41 | 30.455 | 217.546.951 | | |
| | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | NA | 20 | 50.000.000 | 25 | 55.000.000 | 30 | 25.000.000 | 35 | 25.000.000 | 40 | 50.660.134 | 150 | 205.660.134 | | |
| | | | | | | | | 186.318.241 | 100 % | 204.950.065 | 100 % | 225.445.072 | 100 % | 247.989.579 | 100 % | 272.788.537 | | | | |
| | | | **Program Penanganan Bencana** | **Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana** | **Persen** | **100** | **100%** | **186.318.241** | **100%** | **204.950.065** | **100%** | **225.445.072** | **100%** | **247.989.579** | **100%** | **272.788.537** | **100%** | **1.137.491.493** | | |
| | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani | orang | 100 | 1200 | 186.318.241 | 100 % | 204.950.065 | 100 % | 225.445.072 | 100 % | 247.989.579 | 100 % | 272.788.537 | 1750 | 1.137.491.493 | | |
| | | | Penyediaan makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5.987 | 5.987 | 49.994.000 | 5.987 | 54.993.400 | 5.987 | 60.492.740 | 5.987 | 66.542.014 | 5.987 | 73.196.215 | 29.935 | 305.218.369 | | |
| | | | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5.987 | 5.987 | 39.324.241 | 5.987 | 43.256.665 | 5.987 | 47.582.332 | 5.987 | 52.340.565 | 5.987 | 57.574.621 | 29.935 | 240.078.424 | | |
| | | | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 5 | 5 | 34.000.000 | 5 | 37.400.000 | 5 | 41.140.000 | 5 | 45.254.000 | 5 | 49.779.400 | 25 | 207.573.400 | | |
| | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan | Orang | NA | 50 | 30.000.000 | 60 | 33.000.000 | 65 | 36.300.000 | 70 | 39.930.000 | 75 | 43.923.000 | 320 | 183.153.000 | | |
| | | | Pelayanan dukungan psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 5.987 | 400 | 33.000.000 | 450 | 36.300.000 | 495 | 39.930.000 | 500 | 43.923.000 | 550 | 48.315.300 | 2.395 | 201.468.300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** | | **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** | | | **Indeks** | **77,20** | **77,24** | **381.792.919** | **77,28** | **362.779.227** | **77,32** | **370.996.294** | **77,36** | **379.329.758** | **77,40** | **387.954.348** | **77,40** | **1.882.852.546** | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan** | **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** | **20.351.852,00** | - | **Indeks** | **83,09** | **83,44** | **166.899.401** | **83,79** | **142.876.154** | **84,14** | **144.216.885** | **84,49** | **145.576.607** | **84,84** | **146.983.831** | **84,84** | **746.552.878** | | |
| | | | | - | | | | 41.899.401 | 0.40 Persen | 42.876.154 | 0.50 Persen | 44.216.885 | 1.05 Persen | 45.576.607 | 1.10 Persen | 46.983.831 | | | | |
| | | | **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan** | **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** | **Persen** | **0,4** | **0,4** | **41.899.401** | **0,4** | **42.876.154** | **0,6** | **44.216.885** | **0,6** | **45.576.607** | **0,7** | **46.983.831** | **0,7** | **221.552.878** | | |
| | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | Perangkat Daerah | N/A | 5 | 23.709.401 | 10 | 22.867.154 | 15 | 22.206.985 | 20 | 21.365.717 | 25 | 20.351.852 | 25 | 110.501.109 | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 13.709.401 | 1 | 12.867.154 | 1 | 12.206.985 | 1 | 11.365.717 | 1 | 10.351.852 | 5 | 60.501.109 | | |
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | 50 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 | 50 | 50.000.000 | | |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan | Lembaga | N/A | 5 | 18.190.000 | 6 | 20.009.000 | 6 | 22.009.900 | 7 | 24.210.890 | 7 | 26.631.979 | 7 | 111.051.769 | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan | Orang | 25 | 25 | 18.190.000 | 25 | 20.009.000 | 25 | 22.009.900 | 25 | 24.210.890 | 25 | 26.631.979 | 25 | 111.051.769 | | |
| | | | | | | | | 50.000.000 | 56 % | 50.000.000 | 57 % | 50.000.000 | 58 % | 50.000.000 | 59 % | 50.000.000 | | | | |
| | | | **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** | **Persen** | **45** | **45** | **50.000.000** | **46** | **50.000.000** | **47** | **50.000.000** | **48** | **50.000.000** | **49** | **50.000.000** | **49** | **250.000.000** | | |
| | | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya | Keluarga | 50 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 250 | 250.000.000 | | |
| | | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 56 % | 50.000.000 | 57 % | 50.000.000 | 58 % | 50.000.000 | 59 % | 50.000.000 | 3,3 | 250.000.000 | | |
| | | | | - | | | | 75.000.000 | 50 % | 50.000.000 | 50 % | 50.000.000 | 50 % | 50.000.000 | 50 % | 50.000.000 | | | | |
| | | | **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak** | **Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan** | **Persen** | **50** | **55** | **75.000.000** | **60** | **50.000.000** | **65** | **50.000.000** | **70** | **50.000.000** | **75** | **50.000.000** | **75** | **275.000.000** | | |
| | | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak | SKPD | N/A | 5 | 75.000.000 | 10 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 25 | 275.000.000 | | |
| | | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen | 1 | 1 | 75.000.000 | 1 | 50.000.000 | 50 % | 50.000.000 | 50 % | 50.000.000 | 50 % | 50.000.000 | 1 | 275.000.000 | | |
| | **Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan** | **Persentase Perempuan Keluarga Mandiri dalam Perekonomian Keluarga** | | | **Persen** | **NA** | **55** | **214.893.518** | **56** | **219.903.073** | **57** | **226.779.409** | **58** | **233.753.151** | **59** | **240.970.517** | **59** | **1.136.299.668** | | |
| | | | | - | | | | 92.003.335 | 70 % | 94.148.103 | 70 % | 97.092.100 | 70 % | 100.077.800 | 70 % | 103.167.804 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | **Persentase Kecamatan Layak Anak** | **Persen** | **9,52** | **9,52** | **92.003.335** | **9,52** | **94.148.103** | **14,2857** | **97.092.100** | **19,04762** | **100.077.800** | **23,8095** | **103.167.804** | **23,81** | **486.489.142** | | |
| | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga PHA | Lembaga | 2 | 2 | 52.003.335 | 2 | 50.148.103 | 2 | 48.692.100 | 2 | 46.837.800 | 2 | 44.603.804 | 10 | 242.285.142 | | |
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Organisasi | 2 | 2 | 52.003.335 | 2 | 50.148.103 | 2 | 48.692.100 | 2 | 46.837.800 | 2 | 44.603.804 | 10 | 242.285.142 | | |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | Lembaga | 2 | 2 | 40.000.000 | 2 | 44.000.000 | 2 | 48.400.000 | 2 | 53.240.000 | 2 | 58.564.000 | 10 | 244.204.000 | | |
| | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 40.000.000 | 1 | 44.000.000 | 1 | 48.400.000 | 1 | 53.240.000 | 1 | 58.564.000 | 5 | 244.204.000 | | |
| | | | | 0 | | | | 61.819.950 | 100 % | 63.261.087 | 100 % | 65.239.252 | 100 % | 67.245.438 | 100 % | 69.321.709 | | | | |
| | | | **Program Perlindungan Perempuan** | **Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan** | **Rasio** | **2** | **2** | **61.819.950** | **2** | **63.261.087** | **2** | **65.239.252** | **2** | **67.245.438** | **2** | **69.321.709** | **2** | **326.887.436** | | |
| | | 61.819.950 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan | Orang | 5 | 5 | 25.455.950 | 5 | 23.260.687 | 4 | 21.238.812 | 4 | 18.844.954 | 3 | 16.081.177 | 3 | 104.881.580 | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 25.455.950 | 1 | 23.260.687 | 1 | 21.238.812 | 1 | 18.844.954 | 1 | 16.081.177 | 1 | 104.881.580 | | |
| | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan | Orang | 2 | 2 | 36.364.000 | 2 | 40.000.400 | 2 | 44.000.440 | 2 | 48.400.484 | 2 | 53.240.532 | 10 | 222.005.856 | | |
| | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Orang | 5 | 5 | 36.364.000 | 5 | 40.000.400 | 4 | 44.000.440 | 4 | 48.400.484 | 3 | 53.240.532 | 3 | 222.005.856 | | |
| | | | | - 0 | | | | 61.070.223 | 0,094 % | 62.493.883 | 0,093 % | 64.448.057 | 0,092 % | 66.429.913 | 0,091 % | 68.481.004 | | | | |
| | | | **Program Perlindungan Khusus Anak** | **Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)** | **Rasio** | **2** | **2** | **61.070.233** | **3** | **62.493.883** | **3** | **64.448.057** | **3** | **66.429.913** | **3** | **68.481.004** | **3** | **322.923.090** | | |
| | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan | Anak | 10 | 10 | 61.070.233 | 10 | 62.493.883 | 9 | 64.448.057 | 8 | 66.429.913 | 7 | 68.481.004 | 7 | 322.923.090 | | |
| | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 10 | 10 | 30.000.000 | 10 | 33.000.000 | 8 | 36.300.000 | 8 | 39.930.000 | 7 | 43.923.000 | 7 | 183.153.000 | | |
| | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 31.070.233 | 1 | 29.493.883 | 1 | 28.148.057 | 1 | 26.499.913 | 1 | 24.558.004 | 5 | 139.770.090 | | |

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasikan permaslahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Idealnya untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa Indikator, antara lain mengacu pada standar pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Karena lembaga terkait tupoksi DSP3A memiliki SPM, maka DSP3A dapat menganalisis Indikator Kinerja yang mengacu SPM. Sehingga untuk saat ini analisis terhadap kinerja pelayanan SKPD dan menggunakan IKK Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan yang terdapat pada RPJMD dan Renstra DSP3A Tahun 2021-2026.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tertentu dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C. 30**
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan

**Tabel T-C. 30**

**Tabel.T-C.30**
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial sampai dengan Tahun Berjalan**
**Kabupaten Nunukan**

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2) | | | Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan Tahun 2023 (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4)* | 12 |
| | | | | Wajib | | | | | | | | | | |
| | | | | Sosial | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas | 90 | 95% | 85% | 84% | 0,99 | 85% | 264% | 3% | |
| | | | | Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun | 6 | 94,42 | 6 | 6 | 100% | 6 | 106,42 | 1774% | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25 | 94,42 | 5 | 5 | 1,00 | 5 | 10442% | 418% | |
| | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 40% | |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah | Jumlah Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | 97,2 | 12 | 94,43 | 7,87 | 12 | 20363% | 1697% | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 | 97,2 | 32 | 94,43 | 295% | 32 | 223,63 | 699% | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | 6 | 96,91 | 6 | 6 | 1,00 | 6 | 10891% | 1815% | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 45 | 99,98 | 7 | 7 | 100% | 8 | 114,98 | 256% | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 20 | 99,96 | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 10796% | 540% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 13 | 57.99 | 5 | 5 | 100% | 2 | 64.99 | 500% | |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 | 97.45 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 9945% | 1989% | |
| Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | 6 | 82.11 | 6 | 6 | 100% | 6 | 94.11 | 1569% | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 | 21.37 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2337% | 467% | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 15 | 73.43 | 3 | 3 | 100% | 3 | 79.43 | 530% | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 | 84.2 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 8920% | 357% | |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 82.73 | 1 | 1 | 100% | 1 | 84.73 | 8473% | |
| Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara | 58 | 68.87 | 11 | 11 | 1.00 | 11 | 9087% | 157% | |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 | 68.87 | 10 | 10 | 100% | 10 | 88.87 | 178% | |
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 | | 1 | | 0.00 | 1 | 100% | 13% | |
| **Persentase sumberdaya kesejahteraan yang diberdayakan** | 50 | 94.33 | 50 | 99.78 | 200% | 50 | 244.11 | 488% | |
| Jumlah KAT yang diberdayakan | 1 | | 1 | | 0.00 | 1 | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | | 10 | | 0% | 10 | 10 | 100% | |
| Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan | 23 | | 3 | | 0.00 | 5 | 500% | 22% | |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 1 | | 1 | | 0% | 1 | 1 | 100% | |
| Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS | 21 | 94.33 | 21 | 99.78 | 4.75 | 21 | 21511% | 1024% | |
| Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota | 56 | 79.16 | 11 | 99.06 | 901% | 11 | 189.22 | 338% | |
| Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 21 | | 10 | | 0.00 | 10 | 1000% | 48% | |
| Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | | 10 | | 0% | 10 | 10 | 100% | |
| Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 | 100 | 5 | 99.93 | 19.99 | 5 | 20493% | 3416% | |
| **Presentase pengelolaan taman makam pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara** | 80 | | 80 | 99.97 | 125% | 80 | 179.97 | 225% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 1 | | 1 | 1 | 1.00 | 67 | 6800% | 6800% | |
| Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 | | 1 | | 0% | 1 | 1 | 100% | |
| Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 | | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 200% | 200% | |
| **Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani** | 100 | 20.25 | 100 | 75.99 | 76% | 100 | 196.24 | 196% | |
| Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | 58 | 20.25 | 10 | 75.99 | 7.60 | 10 | 10624% | 183% | |
| Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 14% | 20.25 | 10 | 75.99 | 760% | 100 | 196.24 | 140171% | |
| **Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS** | 22.38 | 17.83 | 15.38 | 13.07 | 0.85 | 16.84 | 4774% | 213% | |
| Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 1156 | 28.13 | 190 | 85 | 45% | 207 | 320.13 | 28% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 301 | 36.62 | 51 | 51 | 1.00 | 55 | 14262% | 47% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 96 | 15.05 | 5 | | 0% | 17 | 32.05 | 33% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 21 | | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 300% | 14% | |
| Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 110 | | 20 | 0 | 0% | 20 | 20 | 18% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 61 | | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 1000% | 16% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 270 | | 50 | 48 | 96% | 50 | 98 | 36% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 285 | | 50 | 49 | 0.98 | 50 | 9900% | 35% | |
| Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 | | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 33% | |
| Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial | 100 | | 9 | 9 | 1.00 | 11 | 2000% | 20% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | | 5 | | 0% | 5 | 5 | 20% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah anak terlantar ,lansia terlantar, penyandang disabilitas gelandangan dan | 14 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 400% | 29% | |
| **Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani** | 90 | 53.59 | 86 | 85 | 99% | 93 | 180.2493056 | 200% | |
| Jumlah anak terlantar yang ditangani | 135 | 10.1 | 20 | | 0.00 | 30 | 4010% | 30% | |
| Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 135 | 14.83 | 20 | 20 | 100% | 30 | 64.83 | 48% | |
| Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 | 0 | 10 | 10 | 1.00 | 5 | 1500% | 50% | |
| Jumlah data fakir miskin yang valid | 20 | 71.35 | 20,000 | 20000 | 100% | 20 | 20091.35 | 100457% | |
| Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 27626 | 78.82 | 27.626 | 28 | 1.00 | 27.6265 | 13407% | 0% | |
| Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 5714 | 61.77 | 5,714 | 5600 | 98% | 5,714 | 11375.77 | 199% | |
| Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 30455 | | 6,091 | | 0.00 | 6,091 | 609100% | 20% | |
| Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 | | 20 | | 0% | 25 | 25 | 17% | |
| **Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana** | 100 | 70.48 | 100 | 84.1 | 0.84 | 100 | 25458% | 255% | |
| Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani | 1750 | | 1200 | | 0% | 100 | 100 | 6% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 29935 | 44.63 | 5,987 | 5987 | 1.00 | 5,987 | 1201863% | 40% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat | 29935 | | 5,987 | | 0% | 5,987 | 5987 | 20% | |
| Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 29935 | 84.47 | 5 | 5 | 1.00 | 5 | 9447% | 0% | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | | 50 | | 0% | 60 | 60 | 240% | |
| Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 320 | 99.73 | 400 | 400 | 1.00 | 450 | 94973% | 297% | |
| **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** | 0.7 | | 0.4 | | 0% | 0.4 | 0.4 | 57% | |
| Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 25 | | 5 | | 0.00 | 10 | 1000% | 40% | |
| Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | | 1 | | 0% | 1 | 1 | 20% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 | | 50 | | 0.00 | 50 | 5000% | 100% | |
| Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan | 7 | | 5 | | 0% | 6 | 6 | 86% | |
| Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 25 | | 25 | | 0.00 | 25 | 2500% | 100% | |
| **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** | 49 | | 45 | | 0% | 46 | 46 | 94% | |
| Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya | 250 | | 50 | | 0.00 | 50 | 5000% | 20% | |
| Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.3 | | 1 | | 0% | 56 | 56 | 1697% | |
| **Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanan pembangunan** | 75 | | 55 | | 0.00 | 60 | 6000% | 80% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak | 25 | | 5 | | 0% | 10 | 10 | 40% | |
| Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 | | 1 | | 0.00 | 1 | 100% | 100% | |
| **Persentase Kecamatan Layak Anak** | 23.81 | | 9.52 | | 0% | 9.52 | 9.52 | 40% | |
| Jumlah Lembaga PHA | 10 | | 2 | | 0.00 | 2 | 200% | 20% | |
| Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 10 | | 2 | | 0% | 2 | 2 | 20% | |
| Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 10 | | 2 | | 0.00 | 2 | 200% | 20% | |
| Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | | 1 | | 0% | 1 | 1 | 20% | |
| **Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan** | 2 | | 2 | | 0.00 | 2 | 200% | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan | 3 | | 5 | | 0% | 5 | 5 | 167% | |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | | 1 | | 0.00 | 1 | 100% | 100% | |
| Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan | 10 | | 2 | | 0% | 2 | 2 | 20% | |
| Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan | 3 | | 5 | | 0.00 | 5 | 500% | 167% | |
| **Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)** | 3 | | 2 | | 0% | 3 | 3 | 100% | |
| Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan | 7 | | 10 | | 0.00 | 10 | 1000% | 143% | |
| Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 7 | | 10 | | 0% | 10 | 10 | 143% | |
| Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 7 | | 1 | | 0.00 | 1 | 100% | 14% | |

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Nunukan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi tahun 2021-2026 yakni ***MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA .*** Sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak (DSP3A) agar sesuai dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat umum, dan bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DSP3A, masyarakat dapat memperoleh pelayanan Publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum formal.

## 2.3. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PELAYANAN DSP3A BESERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. Mengurangi beban administratif karena Pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat diwilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data *(data base)*, sehingga mengurangi beban pendataan di PD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan Pelayanan Publik karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah

2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam Penanganan, Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS

3. Belum adanya Database partisipasi PPKS

4. Belum sinkronya Program Penanagan PPKS Lintas OPD.

Dalam Upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Aparatur DSP3A harus berkompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi DSP3A Kabupaten Nunukan, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu proses review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini juga dilakukan dalam rangka merasionalisasi kembali pendanaan indikatif program / kegiatan karena kebijakan keuangan daerah akibat defisit anggaran. Mudah-mudahan di tahun 2024 program / kegiatan dalam pendanaan dapat terealisasi dalam usulan rencana kerja tahun 2024.

Berikut disajikan **Tabel T-C. 31** Review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Renja DSP3A Kab. Nunukan Tahun 2024 :

**Tabel.T-C. 31**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
**Kabupaten Nunukan**

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022(thn n-2) | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024 (thn n) | Tahun 2025 (thn n+1) | Tahun 2022 (thn n-2) | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024(thn n) | Tahun 2025 (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | **85** | **85** | **90** | **90** | 84% | 75.00 | | | |
| | Perencanaan , Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 94.43 | 33.33 | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 94.43 | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33.33 | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33.33 | | | |
| | pengeyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | | | | |
| | Penyediaan jasa Pelayananan Umum Kantor | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 27.27 | | | |
| | penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan ,dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.33 | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 91.33 | | | |
| | **Program Pemberdayaan Sosial** | | | **50** | **50** | **50** | **50** | 99.78 | 99.78 | | | |
| | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 3 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 21 | 21 | 21 | 21 | 99.78 | 99.78 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 99.06 | 99.06 | | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 5 | 5 | 5 | 6 | 99.93 | 99.93 | | | |
| | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | | | **80** | **80** | **80** | **80** | 99.97 | 99.97 | | | |
| | Pemelliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 1 | 67 % | 76 % | 83 % | 1 | | | | |
| | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.97 | | | |
| | **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** | | | **100** | **100** | **100** | **100.00** | 75.99 | 75.99 | | | |
| | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | 10 | 10 | 12 | 12 | 75.99 | 75.99 | | | |
| | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | 75.99 | 75.99 | | | |
| | **Program Rehabilitasi Sosial** | | | **15.38** | **16.84** | **18.88** | **20.50** | 13.07 | 57.07 | | | |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Ter;antar, serta Gelandangan pengemis diluar panti | | | 190 | 207 | 232 | 252 | 85 | 55.06 | | | |
| | Penyediaan Permakanan | | | 51 | 55 | 60 | 65 | 51 | 83.12 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Alat Bantu | | | 5 | 17 | 19 | 25 | | | | | |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | | | | |
| | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | | | | |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 10 | 10 | 12 | 14 | 0 | | | | |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | 50 | 50 | 55 | 55 | 48 | 88.71 | | | |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | 50 | 50 | 60 | 60 | 49 | 87.28 | | | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial | | | 9 | 11 | 13 | 16 | 9 | | | | |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 66.68 | | | |
| | **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial** | | | **86** | **93** | **93** | **93** | 85 | 94.58 | | | |
| | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | 20 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| | Penjangkauan anak-anak terlantar | | | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | | | | |
| | Rujukan anak-anak terlantar | | | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | | | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20000 | 94.58 | | | |
| | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | | | 27,626 | 27,626 | 27,626 | 27,626 | 28 | 97.15 | | | |
| | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | | | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 5600 | 94.51 | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | 6,091 | 6,091 | 6,091 | 6,091 | | | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | 20 | 25 | 30 | 35 | | | | | |
| | **Program Penanganan Bencana** | | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | 84.1 | 84.1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 1200 | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | |
| | Penyediaan makanan | | | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5987 | 67.61 | | | |
| | Penyediaan Sandang | | | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | | | | | |
| | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97.97 | | | |
| | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | 50 | 60 | 65 | 70 | | | | | |
| | Pelayanan dukungan psikososial | | | 400 | 450 | 495 | 500 | 400 | 96.54 | | | |
| | **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan** | | | **0.4** | **0.4** | **0.6** | **0.6** | | 82.67 | | | |
| | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 5 | 10 | 15 | 20 | | 82.67 | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 82.67 | | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 5 | 6 | 6 | 7 | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | |
| | **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | | | **45** | **46** | **47** | **48** | | 95.08 | | | |
| | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 95.08 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1 | 56 % | 57 % | 58 % | | 95.08 | | | |
| | **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak** | | | **55** | **60** | **65** | **70** | | 78.03 | | | |
| | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 5 | 10 | 15 | 20 | | 78.03 | | | |
| | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1 | 1 | 50 % | 50 % | | 78.03 | | | |
| | **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | | | **9.52** | **9.52** | **14.28571429** | **19.04761905** | | 88.28 | | | |
| | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 88.28 | | | |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | **Program Perlindungan Perempuan** | | | **2** | **2** | **2** | **2** | | 89.33 | | | |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 89.33 | | | |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 5 | 5 | 4 | 4 | | 89.33 | | | |
| | **Program Perlindungan Khusus Anak** | | | **2** | **3** | **3** | **3** | | 98.96 | | | |
| | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10 | 10 | 9 | 8 | | | | | |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10 | 10 | 8 | 8 | | | | | |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 98.96 | | | |

## 2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi – asiosiasi, lembaga pendidikan maupun SKPD lainnya, merupakan bagian dari penjaringan aspirasi terkait prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembagian tahun yang direncanakan, sesuia dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dan usulan rencana program dan kegiatan di DSP3A selain diperoleh dari forum resmi musrembang tingkat kecamatan, forum SKPD juga di himpun dari saran dan masukan yang disampaikan melalui Website DSP3A maupun survey dan usulan lisan dari pengguna layanan DSP3A Kab. Nunukan.

**Tabel T-C.32**
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | **1. Program Rehabilitasi Sosial** | | | | |
| | Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Kab. Nunukan | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp100,000,000 | |
| | | | | | |
| | **2. Program perlindungan dan jaminan sosial** | | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Kab. Nunukan | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp41,867,879 | |
| | | | | | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi SKPD, Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran mengambarkan hal-hal yang ingin dicapai dari suatu tujuan melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat rasional, spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja DSP3A Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran target kinerja yang tercantum dalam Rancangan Renstra DSP3A Tahun 2021 - 2026 ditahun kedua perencanaan, yang ditetapkan berdasarkan atas telahaan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Fokus utama tujuan dan sasaran Renja DSP3A pada Tahun 2024 mendatang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**
**Tujuan, Sasaran ,Strategi dan Arah Kebijakan**

| No. | Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman Maju Adil dan Sejahtera | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | Bidang Sosial | | | |
| | Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penanganan dan Pelayanan PPKS | Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | Melaksanakan Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS | Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Pemberdayaan Sosial |
| | | Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS | Melakukan Rehabilitasi Sosial PPKS | Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Rehabilitasi Sosial |
| | | Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Melaksanakan pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS | Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| 2 | Meningkatnya pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak | Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan | Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan | Mendorong peran aktif perempuan terhadap Pendapatan | Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan Visi DSP3A tahun 2021 - 2026 yakni ” Visi : ““Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu”, maka program dan kegiatan yang di rancangkan pada Tahun 2024 dalam upaya mencapai misi tersebut, Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka menjalankan urusan wajib sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan untuk mencapai tujuan, sasaran serta memperhatikan strategi dan kebijakan telah disusun program kerja jangka menengah 2021 - 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKP ) Daerah. Maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nunukan, mempunyai program kegiatan sebagai berikut

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas,maka diperlukan dukungan pendanaan yang memadahi. Anggaran yang diperlukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan guna melaksanakan Program Kegiatan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan telah menetukan program dan kegiatan pembangunan

daerah yang dituangkan kedalam Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026.

Penyajian program dan kegiatan DSP3A dilengkapi dengan indikator sampai dengan kinerja, target, pagu indikator dan lokasi untuk Tahun 2024 disajikan dalam **Tabel T-C. 33** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**
**TAHUN 2024**

| URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2024 | | | | CATATAN PENTING (SUMBER USULAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA | |
| *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **DINAS SOSIAL** | | | | **1,972,861,674.00** | | |
| **Program Pemberdayaan Sosial** | **Persentase sumberdaya kesejahteraan yang diberdayakan** | **Dinas Sosial** | **50** | **50,000,000.00** | **APBD** | |
| Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Jumlah KAT yang diberdayakan | Dinas Sosial | 1 | 10,000,000.00 | APBD | **Stunting** |
| Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 10 | 10,000,000.00 | APBD | |
| Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan | Dinas Sosial | 5 | 10,000,000.00 | APBD | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Dinas Sosial | 1 | 10,000,000.00 | **APBD** | |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS | Dinas Sosial | 21 | 30,000,000.00 | **APBD** | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota | Dinas Sosial | 11 | 15,000,000.00 | APBD | Kemiskinan/ penambahan target |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 10 | 5,000,000.00 | APBD | Kemiskinan/+target |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 10 | 5,000,000.00 | APBD | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 5 | 5,000,000.00 | APBD | |
| **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | **Presentase pengelolaan taman makam pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara** | Dinas Sosial | **80** | **45,142,273** | APBD | |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | Dinas Sosial | 67 % | 45,142,273 | APBD | |
| Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 1 | 25,142,273 | APBD | |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 1 | 20,000,000 | APBD | |
| **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** | **Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani** | Dinas Sosial | **100** | **50,000,000** | APBD | SPM |
| Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Dinas Sosial | 12 | 50,000,000 | APBD | SPM |
| Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 100 % | 50,000,000 | APBD | SPM |
| **Program Rehabilitasi Sosial** | **Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS** | Dinas Sosial | **18.88** | **877,875,156** | APBD | SPM |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Ter;antar, serta Gelandangan pengemis diluar panti | Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Dinas Sosial | 232 | 627,875,156 | APBD | SPM |
| Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 60 | 110,299,898 | APBD | SPM/Stunting/Kemiskinan |
| Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 19 | 100,000,000 | APBD | SPM |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 4 | 103,362,979 | APBD | SPM |
| Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 20 | 100,000,000 | APBD | SPM/ Muswil |
| Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 12 | 64,000,000 | APBD | SPM |
| Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 55 | 50,212,279 | APBD | SPM |
| Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 60 | 50,000,000 | APBD | SPM |
| Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 2 | 50,000,000 | APBD | SPM |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial | 13 | 250,000,000 | APBD | SPM |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 5 | 75,000,000 | APBD | SPM |
| Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah anak terlantar ,lansia terlantar, penyandang disabilitas gelandangan dan penegemis yang memperoleh Layanan Rujukan | Dinas Sosial | 3 | 175,000,000 | APBD | SPM |
| **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial** | **Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani** | Dinas Sosial | **93** | **353,402,879** | APBD | SPM |
| Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | Jumlah anak terlantar yang ditangani | Dinas Sosial | 30 | 161,535,000 | APBD | SPM |
| Penjangkauan anak-anak terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 30 | 52,030,000 | APBD | SPM |
| Rujukan anak-anak terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 5 | 103,505,000 | APBD | SPM |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah data fakir miskin yang valid | Dinas Sosial | 20,000 | 191,867,879 | APBD | |
| Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Dinas Sosial | 27,626 | 75,000,000 | APBD | KEMISKINAN |
| Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 5,714 | 75,000,000 | APBD | |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 6,091 | 16,867,879 | APBD | |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 30 | 25,000,000 | APBD | |
| **Program Penanganan Bencana** | **Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana** | Dinas Sosial | **100%** | **225,445,072** | APBD | SPM |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani | Dinas Sosial | 100 % | 225,445,072 | APBD | SPM |
| Penyediaan makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3xl Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 5,987 | 60,492,740 | APBD | SPM |
| Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan | Dinas Sosial | 5,987 | 47,582,332 | APBD | SPM |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 5 | 41,140,000 | APBD | SPM |
| Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 65 | 36,300,000 | APBD | SPM |
| Pelayanan dukungan psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 495 | 39,930,000 | APBD | SPM |
| **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan** | **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** | Dinas Sosial | **0.6** | **44,216,885** | APBD | |
| Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | Dinas Sosial | 15 | 22,206,985 | APBD | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 1 | 12,206,985 | APBD | |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 50 | 10,000,000 | APBD | |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan | Dinas Sosial | 6 | 22,009,900 | APBD | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Dinas Sosial | 25 | 22,009,900 | APBD | |
| **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** | Dinas Sosial | **47** | **50,000,000** | APBD | |
| Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya | Dinas Sosial | 50 | 50,000,000 | APBD | |
| Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 57 % | 50,000,000 | APBD | |
| **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak** | **Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanan pembangunan** | Dinas Sosial | **65** | **50,000,000** | APBD | |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak | Dinas Sosial | 15 | 50,000,000 | APBD | |
| Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dinas Sosial | 50 % | 50,000,000 | APBD | |
| **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | **Persentase Kecamatan Layak Anak** | Dinas Sosial | **14.28571429** | **97,092,100** | APBD | |
| Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga PHA | Dinas Sosial | 2 | 48,692,100 | APBD | |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Dinas Sosial | 2 | 48,692,100 | APBD | KLA |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | Dinas Sosial | 2 | 48,400,000 | APBD | |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 1 | 48,400,000 | APBD | |
| **Program Perlindungan Perempuan** | **Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan** | Dinas Sosial | **2** | **65,239,252** | APBD | |
| Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan | Dinas Sosial | 4 | 21,238,812 | APBD | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 1 | 21,238,812 | APBD | |
| Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan | Dinas Sosial | 2 | 44,000,440 | APBD | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Dinas Sosial | 4 | 44,000,440 | APBD | |
| **Program Perlindungan Khusus Anak** | **Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000 anak)** | Dinas Sosial | **3** | **64,448,057** | APBD | |
| Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan | Dinas Sosial | 9 | 64,448,057 | APBD | |
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 8 | 36,300,000 | APBD | |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Sosial | 1 | 28,148,057 | APBD | |

# BAB V
# PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Nunukan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penentu kebijakan khsusunya dalam pengalokasian anggaran yang ada untuk terlaksananya Program Dan Kegiatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Nunukan dengan memperhatikan aspek kontribusi kegiatan sub bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi Kabupaten Nunukan.

Namun apa yang telah direncankan dalam program dan kegiatan tahun 2024 merupakan sebagaian dari kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Nunukan pada umumnya masih jauh apa yang diinginkan, maka untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang tidak menutup kemungkinan masukan dan sumbang saran dalam penyempurnaan kegiatan – kegiatan yang akan datang.

**Nunukan, 11 September 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**FARIDAH ARYANI, SE.M.A.P**

**NIP. 19681128 199103 2 005**